

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Setyawan, 2018). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan menjadi media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya

kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu. Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, terdapat empat kelompok utama yang membutuhkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Empat kelompok utama tersebut, yaitu: masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; serta pemerintah. Untuk itu, pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk menyajikan dan melaporkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Informasi akan dikatakan bermanfaat bila informasi tersebut dapat membantu dan mendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para pemakainya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Dengan terpenuhinya karakteristik tersebut laporan keuangan akan menjadi berkualitas. Kualitas laporan

keuangan pemerintah erat kaitannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: (1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, (2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas, maka instansi pemerintah harus menerapkan akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar akuntansi. Laporan keuangan yang harus disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (8) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. SAP berfungsi sebagai acuan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang termuat apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti dan Ari, 2014). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hevesi, 2005 dalam

indriasari, 2008). Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak dilandasi dengan kompetensi yang memadai seseorang tidak akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi di dalam dirinya tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini berlaku di setiap bidang pekerjaan, begitu juga di entitas pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Menurut BPK kualitas laporan keuangan pemerintahan semakin membaik. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat. Berdasarkan data BPK, pada tahun 2009 sebanyak 44 dari 78 laporan keuangan kementerian dan lembaga atau sekitar 56 persen di antaranya memperoleh predikat WTP. Dan pada 2013 meningkat, yaitu menjadi 64 dari 86 atau sekitar 74 persen. Selain itu, walaupun peningkatan jumlah daerah yang mendapat WTP tidak sebaik di kementerian, trennya terus meningkat. Berdasarkan data 2009, pendapat WTP diberikan kepada 15 dari 504 daerah atau sekitar 3 persen. Tapi pada tahun 2013 membaik, yaitu diberikan kepada 153 dari 456 atau sekitar 33 persen dari keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian Ramadhan dan Fahrani, (2024) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian Imalia, Azis dan Rachma (2023) kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Yanto (2024) kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Sinulingga, Simanjuntak, & Ginting (2022) kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Pravasanti & Ningsih (2019) aparatur pemerintah yang berkualitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kecamatan di Sabu Raijua”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor kecamatan raijua.

C. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Raijua.

- b. Apakah Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pada Kantor Kecamatan Rajjua.
- c. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Rajjua.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Rajjua.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pada Kantor Kecamatan Rajjua.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Rajjua.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Menjelaskan hasil dari penelitian tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Rajjua

b. Manfaat akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga universitas Kristen artha wacana khususnya fakultas ekonomi

c. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai di organisasi.